

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 205 – 218

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA PENATA USAHA ANGGARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU

MELISA WATI VERONIKA

melisawativeronika@gmail.com

ANNIE MUSTIKA PUTRI

annemustika@umri.ac.id

RAMA GITA SUCI

ramagita@umri.ac.id

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

Received: 12/08/2022	Revised: 10/09/2022	Accepted: 30/09/2022
----------------------	---------------------	----------------------

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi SAKTI yang diterapkan oleh Penata Usaha Anggaran Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sudah berjalan efektif. Metode yang digunakan adalah kualitatif, Teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, pengamatan, kepustakaan dan dokumentasi. Kemudian disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 171/PMK.05/2021. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SAKTI yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 171/PMK.05/2021. Serta penggunaan aplikasi SAKTI juga sudah berjalan efektif.

Kata Kunci: Implementasi, Aplikasi SAKTI, Penata Usaha Anggaran

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the implemented by the Budget Administration of the Pekanbaru City Land Office has been running effectively. The method used is qualitative. Data collection techniques are interview, observation, literature and documentation techniques. Then adjusted to the regulation of the minister of finance No.171/PMK.05/2021. And the use of the SAKTI application has also been running effectively.

Keywords: Implementation, SAKTI Application, Budget Administration

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 205 – 218

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

I. PENDAHULUAN

Reformasi pengelolaan keuangan APBN dengan penerapan teknologi informasi di Indonesia mulai dilakukan pada tahun 2003. Perubahan fundamental dilakukan pada tahun 2013 dengan diimplementasikannya Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) secara nasional pada seluruh unit Kementerian Keuangan yang berfungsi sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Pengelolaan APBN dengan perubahan proses bisnis melalui dukungan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dan berbasis internet. Perubahan proses bisnis dalam pengelolaan dana APBN oleh BUN atau Kuasa BUN di pusat maupun daerah berakibat pada penyesuaian proses bisnis dan pengguna sistem teknologi informasi di tingkat satuan kerja pengguna dana APBN di seluruh Indonesia yang mencapai kurang lebih 25 ribu satuan kerja (satker). Oleh karena itu pada akhir tahun 2015, pemerintah meluncurkan sistem teknologi informasi baru yang bernama Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

SAKTI merupakan sebuah aplikasi sebagai bagian *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS) yang digunakan secara mandatory oleh instansi atau satuan kerja pengelola dana yang bersumber dari APBN. Sistem ini dibangun guna mendukung prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang tertip, efektif, efisien,

ekonomis, transparan dan akuntabel (Sihotang et al., 2020).

SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja (satker) dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggung jawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban anggaran. Selain itu SAKTI menerapkan konsep singgel database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. Terdapat berbagai modul yang ada di aplikasi SAKTI, seperti Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Pelaporan, dan Modul Administrator (Kementerian Keuangan RI, 2021).

SAKTI merupakan penyempurnaan teknologi untuk proses bisnis Kementerian Keuangan. Sistem ini untuk memenuhi kebutuhan akan sistem informasi BUN untuk level satuan kerja. Ini karena SPAN tidak memungkinkan hingga level tersebut. Penggarapan SAKTI sudah dilakukan sejak 2009. Sebenarnya ide awalnya untuk mengintegrasikan dengan proses bisnis SPAN. Sebab jika dipaksakan menggunakan SPAN, membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan tidak

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 205 – 218

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

efisien secara ekonomi. Dengan SAKTI aplikasi- aplikasi terkait pengelolaan keuangan negara yang sebelumnya lumayan banyak dan berdiri masing-masing dipersatukan menjadi satu aplikasi dengan basis data terintegrasi. Tujuannya pengelolaan keuangan negara menjadi lebih sederhana untuk digunakan. Oleh karena itu duplikasi pekerjaan dapat dikurangi dan pengulangan entry data juga semakin sedikit. Petugas dari satker tidak harus datang ke KPPN untuk menyampaikan pengajuan pembayaran, melainkan cukup memanfaatkan aplikasi terintegrasi yang telah dibangun dan bisa diakses dari kantor masing-masing secara online (Keuangan, 2020).

Implementasi SAKTI dilakukan secara bertahap. Kementerian Keuangan telah melakukan implementasi berupa piloting sebanyak tiga tahap. Hingga akhir tahun 2019 piloting SAKTI telah dilakukan terhadap seluruh satker di lingkungan Kementerian Keuangan dan beberapa satker di luar Kementerian Keuangan. Implementasi SAKTI secara *roll-out* ke seluruh Kementerian Negara/Lembaga akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2020 akan dilakukan implementasi SAKTI ke seluruh Kementerian Negara/Lembaga untuk modul Administrator dan modul Penganggaran.

Dalam tahap piloting awal, masih ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan stabilitas sistem, kualitas output, teknis penggunaan, hingga layanan dukungan SAKTI.

Sebagai contoh, masih terjadi gangguan konektivitas jaringan, masih terdapat celah kesalahan input data, masih terdapat bug atau kerusakan teknis yang menyebabkan aplikasi *error*, kurang lengkapnya *fitur* yang disediakan, kurang lengkapnya data *output* yang dihasilkan, *user interface* dan *user experience* yang kurang nyaman, penggunaan istilah asing yang sulit dipahami pengguna baru, hingga kurang efektifnya layanan dukungan dari tim pendamping piloting (Pambudi dan Adam, 2018).

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian analisis SAKTI yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi SAKTI yang telah diterapkan oleh Penata Usaha Anggaran Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, serta untuk mengetahui apakah implementasi SAKTI yang diterapkan oleh Penata Usaha Anggaran Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sudah berjalan efektif.

II. LANDASAN TEORI

Teori Implementasi Kebijakan

Pendekatan yang relevan dalam teori yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori implementasi kebijakan. Kaitan dengan penelitian ini yaitu penulis menganalisis suatu penerapan atau implementasi SAKTI terhadap pengelolaan keuangan. Teori ini mengacu pada George C. Edwards III (1980) yang pertama kali mengemukakan bahwa implementasi

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 205 – 218

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu Komunikasi (*communications*), Sumber daya (*resources*), Sikap (*disposition*) dan Struktur Birokrasi (*bureucratic structure*). Empat variabel tersebut dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat (Pasha, 2021).

Implementasi kebijakan di perlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Ripley dan Franklin (1986) bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu: 1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang, 2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta 3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program tearah (Akib, 2010). Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk dari kebijakan itu.

Berdasarkan teori yang diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu perencanaan dari penerapan suatu sistem yang dibuat oleh instansi guna memberikan perubahan yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya terutama pada tingkat kepatuhan birokrasi serta sumber dayanya.

Definisi Aplikasi SAKTI

SAKTI merupakan perwujudan dari sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi untuk mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara. SAKTI berperan sebagai *mirroring* Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada level satker. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. SAKTI menerapkan konsep singgel database. SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan pelaporan seluruh Kementerian Negara/Lembaga.

Perbedaan SAKTI dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya adalah sebagai berikut: (1) SAKTI menggunakan satu database yang terpusat dan sama (*single database*); (2) SAKTI memiliki keamanan yang lebih tinggi dengan adanya proses enkripsi/dekripsi arsip data komputer; (3) SAKTI dapat diinstall pada beberapa sistem oprasi komputer; (4) SAKTI lebih mudah digunakan; dan (5) SAKTI memiliki kinerja aplikasi

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 205 – 218

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

yang konsisten (Sutiono & Taufiqurahman, 2020).

Implementasi Aplikasi SAKTI

Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 223/PMK.05/2015, nomor 131/PMK.05/2016, dan 171/PMK.05/2021 diawali dengan tahapan uji coba terbatas (*piloting*) mulai tahun 2015. Dalam tahap *piloting* awal, masih ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan stabilitas sistem, kualitas output, teknis penggunaan, hingga layanan dukungan SAKTI. Sebagai contoh, masih terjadi gangguan konektivitas jaringan, masih terdapat celah kesalahan input data, masih terdapat *bug* yang menyebabkan aplikasi *error*, kurang lengkapnya fitur yang disediakan, kurang lengkapnya data output yang dihasilkan, *user interface* dan *user experience* yang kurang nyaman, penggunaan istilah asing yang sulit dipahami pengguna baru, hingga kurang efektifnya layanan dukungan dari tim pendamping *piloting*. SAKTI merupakan proyek berskala nasional yang menghabiskan biaya, waktu, tenaga dan pikiran yang tidak sedikit. Namun, besarnya pengorbanan yang dikeluarkan tersebut nyatanya belum tentu menjamin keberhasilan implementasinya (Pambudi & Adam, 2018).

Penata Usaha Anggaran

Berdasarkan Permen Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 pada pasal 5 dijelaskan bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan kanktor wilayah. Kemudian pada pasal 8 ayat 1 dijelaskan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program strategis pertanahan, dan kegiatan pertanahan serta pengordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jendral Tata Ruang terus melakukan percepatan implementasi pelaksanaan transpormasi digital, salah satunya dengan menyelenggarakan sosialisasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Teknologi informasi mendorong transpormasi dan paradikma birokrasi tradisional menuju paradikma *e-government* salah satunya dengan mengembangkan sistem dokumen berbasis teknologi dan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan APBN. Dalam mendorong

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 205 – 218

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

revolusi industry 4.0, diperlukan adanya percepatan teknologi salah satunya dengan digitalisasi SAKTI.

Aplikasi SAKTI digunakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi satuan kerja lainnya dengan menerapkan konsep single database dan terhubung dengan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Implementasi aplikasi SAKTI berbasis web berfokus pada pemanfaatan teknologi dengan tidak mengesampingkan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Pelatihan yang berkelanjutan akan meningkatkan pemahaman pengelola keuangan negara dalam upaya mewujudkan *good governance* (Sekretaris Ditjen Tata Ruang, 2021).

Modul Penganggaran Aplikasi SAKTI

Modul Penganggaran adalah Modul yang memuat proses Penyusunan Rencana Kerja Anggaran sampai dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran termasuk didalamnya proses perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan dalam periode satu tahun anggaran. Modul Penganggaran pada SAKTI meliputi : Fungsi Penyusunan SBK (Standar Biaya Keluaran): SBK Total dan SBK Indeks. Fungsi Penyusunan Anggaran (Kertas Kerja/RKAKL-DIPA): Belanja, Pendapatan/Penerimaan, Informasi BLU, Informasi Valas/PHLN, KPJM, Data Pegawai. Fungsi Penyusunan

Rencana Penarikan dan Penerima Dana: Hal III DIPA, AFP (Annual Financial Plan) per bulan dalam satu tahun. Fungsi Pembuatan Usulan Revisi: Satker (POK), DIPA (Kanwil DJPB/DJA). Integrasi Modul penganggaran pada SAKTI merupakan gabungan dari beberapa aplikasi yang telah ada sebelumnya untuk kemudian dilakukan penyatuan sehingga tercipta penyederhanaan proses kerja hanya melalui satu aplikasi saja. Proses ini merupakan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja yang nantinya akan disahkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran berikutnya. Proses yang ada pada aplikasi SAKTI dimulai dari usulan satuan kerja yang nantinya akan disampaikan ke level unit Eselon I dan selanjutnya akan disampaikan ke Direktorat Jenderal Anggaran. Kegiatan ini melibatkan dua level user, yaitu: Operator dan Approver (KPA); baik itu di level Satker, Unit Eselon I, maupun DJA.

Role dalam Modul Penganggaran

Terdapat beberapa role yang ada dalam Modul Penganggaran, dibedakan pada role Operator Satker dan role Approver/KPA Satker dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing role.

Operator Satker : Membuat Rencana Kerja Anggaran Satker (RKA), Mencetak RKAKL, Mencetak Lampiran RKAKL, Mencetak

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 205 – 218

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Laporan-Laporan, Mengirim ADK DIPA Revisi (Arsip Data Komputer Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran), Merekam data POK, Merestore dan merekam data pegawai, Mencetak konsep Dipa, Merekam Usulan SBK, Mengakses data referensi, dan lain-lain.

Approver/KPA satker: Persetujuan data RKA- Satker, Persetujuan data Rencana Penarikan Dana (POK), Persetujuan data Rencana Penarikan Pendapatan/Penerimaan.

Alur Penyusunan Anggaran

1. Persetujuan/Penolakan usulan RKAKL,
2. Membuat ADK RKAKL Unit,
3. Satker,
4. Unit

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan maksud untuk memahami dan menggali lebih dalam mengenai fenomena proses tahapan implementasi aplikasi SAKTI. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2016). Penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus, yaitu metode penelitian yang berusaha

menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai kasus yang ada. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tipe studi deskriptif berorientasi untuk memberikan deskriptif (gambaran) konteks peristiwa dan ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” (Wibowo, 2019). Tipe studi kasus deskriptif ini memiliki kemampuan mendeskripsikan suatu fenomena secara lengkap dan komprehensif beserta konteks permasalahan yang melingkupinya (Wibowo, 2019).

Dalam penelitian kualitatif metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen (Wibowo, 2019). Selain itu penelitian kualitatif juga sering disebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Moleong (2012) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi, penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan.

Serta tambahan data melalui dari berbagai sumber, mulai dari buku, jurnal online, artikel, berita dan penelitian terdahulu sebagai penunjang data maupun pelengkap data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 205 – 218

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Implementasi Penata Usaha Anggaran terhadap aplikasi SAKTI

Penyusunan, Pengelolaan sampai dengan Penyampaian laporan pertanggung jawaban saat ini sudah menggunakan aplikasi SAKTI. Aplikasi SAKTI merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementrian Keuangan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021, tentang pelaksanaan sistem aplikasi SAKTI. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu proses penata usaha anggaran seperti pada bunyi pasal 1 poin 1 yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 menjadi dasar penata usaha anggaran dalam melaksanakan aktivitasnya secara elektronik. Seperti dalam penelitian ini, implementasi yang dilakukan oleh penata usaha anggaran Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menggunakan sistem elektronik berupa Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Melalui sistem ini, penata usaha anggaran melakukan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. Hal ini

sebagaimana dalam PMK Nomor 171/PMK.05/2021.

Kemudian yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu aktivitas implementasi penata usaha anggaran terhadap penggunaan aplikasi SAKTI dalam pengelolaan keuangan negara. Sehingga yang dilihat yaitu hasil akhir dari aktivitas penata usaha anggaran berupa laporan keuangan. Seperti yang di jelaskan pada pasal 1 poin 64 yaitu dimana Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa informasi terkait dengan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu dimana penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dilakukan oleh penata usaha anggaran Kantor pertanahan kota pekanbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang pelaksanaan sistem SAKTI. Temuan pertama yang diperoleh penulis adalah dimana pengguna (Operator) SAKTI pada perencanaan memiliki tugas pokok sebagai berikut dimana operator menggunakan aplikasi SAKTI tersebut

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 205 – 218

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

untuk pengimputan rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun yang akan datang serta melakukan perubahan (revisi) anggaran dalam tahun berjalan, dan melakukan pencatatan keuangan berbasis web, serta melaporkan pelaporan keuangan dalam periode bulanan, semesteran, maupun tahunan sesuai dengan tahun anggaran.

Dalam laporan yang dihasilkan oleh aplikasi SAKTI untuk user anggaran ada banyak tetapi yang paling sering di gunakan adalah, laporan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Rincian Kertas Kerja, sementara itu laporan yang dihasilkan oleh aplikasi SAKTI untuk user bendahara yaitu berbentuk berbagai sub sekelompok yaitu pertama itu ada laporan kas tunai, kas bendahara di bank, maupun kas bendahara di lain-lain nya.

Dalam Proses penyusunan laporan keuangan sudah disusun berdasarkan kebijakan akuntansi. Sehingga laporan keuangan yang di hasilkan sudah sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terkait implemetasi Penata Usaha Anggaran terhadap penerapan sistem aplikasi SAKTI, prosedur yang dilakukan dalam menghasilkan perencanaan sampai dengan hasil laporan pertanggung jawaban bendaharawan dapat dilihat melalui menu sitem aplikasi SAKTI. Kemudian dari

aktivitas tersebut juga terdapat output yang dihasilkan seperti laporan RKA-KL, Cetak Surat Perintah Membayar dan Cetak LPJ. Sehingga tampilan aplikasi SAKTI dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Tampilan Menu Awal Aplikasi SAKTI

Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru oleh penata usaha anggaran meliputi berbagai macam aktivitas hingga akhirnya menghasilkan suatu laporan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban. Selanjut nya laporan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dimulai dari alur penyusunan rencana kerja anggaran sampai dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran termasuk didalamnya proses perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan dalam periode satu tahun anggaran. Dalam proses penyusunan RKA-KL terdapat beberapa cara yaitu yang pertama melakukan migrasi data RKA-KL dari DIPA terakhir tahun anggaran sebelumnya kemudian yang kedua Upload ADK RKA-KL dari

Accountia Journal

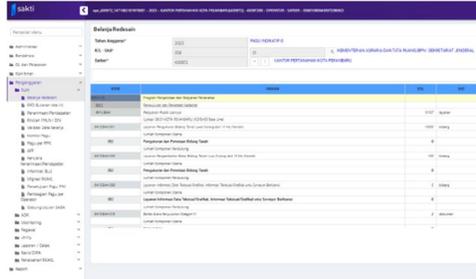
(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 205 – 218

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Aplikasi RKA-KL, selanjutnya yang ketiga melakukan pengimputan data RKAKL, Gambar 4.2 sebagai berikut:



Gambar 4.2 Tampilan Menu Input Data RKA-KL

Setelah operator anggaran melakukan pengimputan data rencana Penerimaan/Pendapatan bulanan yang dapat dilakukan pada menu RUH> Rencana Penerimaan/Pendapatan. Langkah yang harus dilakukan oleh operator anggaran sebelum data belanja dapat disapprove oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah melakukan validasi data belanja untuk mengetahui secara sistem, langkah mana yang terlewat atau belum sesuai.

Dalam proses revisi DIPA operator anggaran juga sudah menggunakan aplikasi SAKTI. Berikut tahapan yang dilakukan operator anggaran dalam melakukan revisi DIPA pada aplikasi SAKTI, yaitu login pada tahun berjalan, selanjutnya masuk ke menu utility > memilih status histori A – Usulan revisi DIPA, kemudian melakukan input data pada form belanja, menyesuaikan data RPD (Rencana Penarikan Dana) pada form petunjuk operasional kegiatan (POK), menyesuaikan data rencana penerimaan dan pendapatan (bulanan), validasi data

belanja, approval oleh KPA, pembuatan ADK usulan revisi dan pengiriman ADK ke kanwil, setelah itu download ADK dan konversi ke SAKTI (sekarang sudah otomatis), Gambar 4.3 sebagai berikut:



Gambar 4.3 Tampilan Menu Monitoring Revisi DIPA

Berdasarkan tahapan pada operator anggaran yang telah dijelaskan di atas, maka proses implementasi aplikasi SAKTI pada operator anggaran sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, bukan hanya pada operator anggaran saja pada operator bendaharawan juga sudah menggunakan aplikasi sakti dalam proses melakukan surat perintah bayar (SPM) dan laporan pertanggungjawaban (LPJ), seperti yang terlihat pada Gambar 4.4 dan pada Gambar 4.5 sebagai berikut:

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 205 – 218

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>



Gambar 4.5 Tampilan Surat Perintah Membayar



Gambar 4.5 Tampilan Laporan Pertanggungjawaban

Efektifitas Penata Usaha Anggaran terhadap aplikasi SAKTI

Kantor Pertanahan adalah Kantor yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah. Dimana setiap tahun nya melakukan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja Negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan Negara. Dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan serta

pertanggung jawaban anggaran dengan menggunakan aplikasi SAKTI masih ditemukan nya permasalahan mulai dari dokumen yang tidak valid dimana apabila dokumen tidak lengkap sehingga sehingga tidak dapat di upload pada aplikasi SAKTI karena aplikasi tersebut berbasis sistem sehingga secara otomatis pengimputan dokumen sudah terstruktur.

Kendala yang dialami lainnya yaitu dimana masi ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan stabilitas sistem, kualitas output, teknis penggunaan, hingga layanan dukungan SAKTI. Masi sering terjadi gangguan konektivitas jaringan, sering terjadi maitrnance yang berlangsung beberapa hari (dengan pemberitahuan sebelumnya) dan juga masi ada bug/error yang terjadi. Contoh saat pengimputan pagu anggaran 2023 diwajibkan untuk mengimput lokus berupa provinsi pada subkomponen yang memiliki lokus provinsi yang dicari.

Selain itu juga kendala lainnya adalah dalam pengimputan data pagu anggaran adalah distribusi pagu yang didapat hingga satuan terkecil, misalnya Rp.3.214.671 tetapi aplikasi SAKTI hanya mengunci angka hingga ribuan Rp.3.214.000 sehingga secara total aka nada selisih yang lumayan besar. Kendala-Kendala tersebut terkadang baru terdeteksi pada saat pengguna aplikasi sedang melakukan proses pengerjaan laporan dengan menggunakan aplikasi SAKTI.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 205 – 218

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Hasil selanjutnya juga diperoleh berdasarkan rumusan masalah yaitu terkait efektif atau tidaknya penatausaha anggaran terhadap aplikasi SAKTI. Berdasarkan efektifitas penatausaha anggaran dalam menyampaikan laporan perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan oleh aplikasi SAKTI.

Penyampaian laporan keuangan biasanya dilakukan persemester seperti laporan keuangan januari sampai dengan juni, pelaporan tersebut dasarnya dari aplikasi SAKTI.

Selain itu efektifitas tidak hanya dilihat mudah atau tidaknya pengguna (operator) dalam menerapkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, melainkan juga dari latar belakang Pendidikan dan pemahaman terhadap individual itu sendiri. Pegawai yang memiliki latar belakang sesuai dengan bidangnya seperti akuntansi yaitu terkait perencanaan dan bendahara pengeluaran, biasanya lebih cepat memahami tentang dasar-dasar akuntansi. Sehingga pegawai tersebut tinggal mempelajari tentang penggunaan aplikasi SAKTI yang berarti membutuhkan waktu yang tidak lama, dibandingkan pegawai yang bukan berlatar belakang akuntansi.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan SAKTI yang dijalankan sepenuhnya oleh sebagian besar staf perencanaan dan bendaharawan, yang

telah memiliki pemahaman lebih tentang akuntansi.

V. KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dimulai dari pengumpulan data, penyajian, serta pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi SAKTI yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 171/PKM.05/2021, tentang pelaksanaan sistem aplikasi SAKTI. Hasil yang diperoleh yaitu Penyusunan, Pengelolaan, sampai dengan Penyampaian laporan pertanggungjawaban saat ini sudah menggunakan aplikasi SAKTI.

2. Penggunaan aplikasi SAKTI sudah berjalan efektif dapat dilihat mulai dari proses laporan pertanggungjawaban, seluruhnya sudah menggunakan aplikasi sakti, selain itu juga penerapan aplikasi SAKTI sepenuhnya sudah dijalankan oleh sebagian besar staf perencanaan dan bendaharawan, yang telah memiliki pemahaman lebih tentang akuntansi meskipun di dalam proses penerapannya masi di temukan kendala seperti, *server error*, *jaringan* serta masih sering terjadinya *maintenance* meskipun sebelumnya sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 205 – 218

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implentasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana Haedar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Amriani, T. N., & Iskandar, A. (2019). Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan (Bppk). *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1), 54-74.
- Harnowo, S., Santoso, B., & Suryani, E. (2021) Determinants Of Agency Level Financial Application Systems (Sakti): Human-Organization-Technology (Hot) Fit Framework. *Jurnal Akuntansi*, 31(3), 769-781.
- Keuangan, K. (2020). *Perjalanan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan* (R.S. Azahari & Tim (Eds)). Biro Organisasi Dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Moleong, L.J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, H.P., & Lestyowati, J. (2020). Analisis Tigkat Kepuasan Dan Kepentingan Pengguna Aplikasi Sakti Dengan Pieces Framework. *Indonesia Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 93-104.
- Pambudi, K.H., & Adam, H. (20180). Analisis Dimensi Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Kenguangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Wilayah Provinsi Jawa Timur Dengan Pendekatan Delone And Mclean Informasi System Success Model. *Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya*.
- Pasha, A.D. (2021). *Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Satker (Sas) Dalam Pengelolaan Keuangan*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 223/PMK.05/2015 tentang *Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 131/PMK.05/2016 tentang *Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 223/PMK.05/2015*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 131/PMK.05/2016 tentang *Pelaksanaan Sistem SAKTI*
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 38 tahun 2016 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan*.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.2, October 2022, pp. 205 – 218

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

- Ri, K. K. (2021). *Implementasi Sakti Web Full Modul*. <https://djp.kemkeu.go.id/kppn/masohi/id/data-publikasi/berita-terbaru/2852-implementasi-sakti-web-full-modul.html>.
- Ruang, S.D.T. (2021, November 5). Koordinasi Penerbitan Dan Pencatatan Barang Milik Negara Dan Percepatan Implementasi Aplikasi Sakti Pada Direktorat Jenderal Tata Ruang. *Direktorat Jenderal Tata Ruang-Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*.
- Sihotang, J. S., Balai, W., & Keuangan, D. (2020). Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Layanan Dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(1), 1-9.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cv Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cv Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cv Alfabeta.
- Supristiowadi, E., & Sucahyo, Y. G. (2018). Manajemen Risiko Keamanan Informasi Pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Kementerian Keuangan. *Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 23–33.
- Sutiono, & Taufiqurahman, T. R. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Resistensi Pengguna Terhadap Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 47–60.
- Wibowo, I. T. (2019). Proses Difusi Inovasi Program Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti): Studi Kasus Pada Ditjen Perbendaharaan Di D.I. Yogyakarta Tahun 2018. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik Proses*, 4(4), 323–337.